

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BUDAYA KAMPUNG ADAT WARU WORA (Studi Kasus Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat)

Ferdianto Tamo Ama¹, Maximianus Ardon Bidi²

ferdiantotamoama@gmail.com¹

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Pengembangan wisata budaya menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya lokal. Kampung Adat Waru Wora di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi budaya yang cukup besar, tetapi pengelolaannya sebagai destinasi wisata belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa tergolong cukup baik, ditandai dengan penerapan tata kelola yang partisipatif, keterlibatan masyarakat dan lembaga adat dalam perencanaan, serta terjalannya kerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, pengelolaan wisata budaya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya regulasi khusus, belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata, keterbatasan kompetensi aparatur, minimnya pelatihan, keterbatasan anggaran, dan kemitraan yang belum optimal. Di sisi lain, dukungan masyarakat adat, keaslian budaya, potensi lingkungan, dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendukung pengembangan wisata budaya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan kemitraan perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan pengelolaan wisata budaya yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kapasitas Pemerintah Desa, Wisata Budaya, *Capacity Building*, Pengembangan Desa Wisata, Kampung Adat Waru Wora.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya, menyusun perencanaan pembangunan, serta mengembangkan potensi ekonomi sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal. Kewenangan tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam menentukan arah pembangunan desa. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta kemampuan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah desa yang memiliki kapasitas yang memadai akan lebih mudah mengenali

potensi wilayah, merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melaksanakan program pembangunan secara efektif serta berkelanjutan (Setiawan et al., 2024).

Di antara berbagai potensi yang dapat dikembangkan di tingkat desa, sektor pariwisata, khususnya wisata budaya, menjadi salah satu alternatif yang mampu mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Pengembangan wisata budaya tidak semata-mata bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial, budaya, serta lingkungan di wilayahnya. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tepat, memberdayakan masyarakat, serta mengelola potensi lokal secara optimal sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan (Umbu T.W. Pariangu, 2026)

Selain berfungsi sebagai daya tarik wisata, budaya lokal juga dapat menjadi modal penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Tradisi, adat istiadat, sejarah, dan berbagai bentuk kearifan lokal memiliki nilai yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang memberikan manfaat ekonomi tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat (Handini & Darwina, 2025). Apabila dikelola dengan baik, pengembangan wisata budaya mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka peluang usaha baru yang berbasis pada potensi lokal. Dengan demikian, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan (Asruni Azis, 2025).

Dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama wisata budaya, kapasitas kelembagaan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan destinasi. Pemerintah desa tidak hanya dituntut memiliki organisasi yang berjalan dengan baik, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi aparatur, menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta membangun kerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut merupakan bagian dari capacity building, yaitu proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem pemerintahan agar mampu menjalankan fungsi pembangunan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan (Damayanti & Ribawanto, 2011). Dengan demikian, kapasitas pemerintah desa menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan potensi wisata budaya di tingkat lokal.

Di sisi lain, wisata budaya yang berbasis kampung adat memiliki karakteristik tersendiri karena mengandalkan keaslian tradisi, nilai budaya, sistem sosial, serta berbagai kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Rumah adat, ritual tradisional, dan warisan budaya lainnya bukan sekadar objek wisata, tetapi juga menjadi identitas yang memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan (Puja & I, 2021). Oleh sebab itu, pengembangannya perlu dilakukan melalui prinsip pelestarian budaya dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh tetap sejalan dengan upaya menjaga keberlangsungan budaya lokal (Zulhuda & Intan, 2025).

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan wisata budaya. Pendekatan Community-Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Melalui pendekatan tersebut, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat tanpa mengurangi nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi (Puja & I, 2021).

Partisipasi masyarakat juga akan memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan (Susana Santy & Rusnisti, 2026). Selain itu, pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menekankan bahwa pembangunan desa sebaiknya bertumpu pada potensi dan aset yang telah dimiliki masyarakat, seperti modal sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan memanfaatkan kekuatan lokal tersebut, pembangunan desa diharapkan mampu menciptakan kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Petrus & Promono, 2025).

Salah satu wilayah yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya adalah Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Desa ini memiliki Kampung Adat Waru Wora yang hingga kini masih mempertahankan keaslian budaya masyarakat Sumba. Keberadaan 36 rumah adat, berbagai tradisi dan ritual adat, serta pola kehidupan masyarakat yang tetap diwariskan secara turun-temurun menjadi daya tarik utama kawasan ini. Selain memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi, Kampung Adat Waru Wora juga didukung oleh kondisi lingkungan alam yang masih terjaga sehingga berpotensi menjadi destinasi wisata budaya yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di balik potensi tersebut, pengembangan wisata budaya di Kampung Adat Waru Wora masih menghadapi berbagai tantangan. Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dinilai belum optimal, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata masih terbatas, regulasi khusus mengenai pengelolaan wisata budaya belum tersedia, serta sarana dan prasarana pendukung destinasi masih perlu ditingkatkan (Febriyanti, 2026). Selain itu, kegiatan promosi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan secara maksimal sehingga potensi wisata yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata budaya tidak hanya bergantung pada kekayaan potensi yang dimiliki, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkannya (H.J. Pramaswari, I Made Sendra, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata maupun pariwisata berbasis budaya. (Setiawan et al., 2024) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Sementara itu, (Damayanti & Ribawanto, 2011) menjelaskan bahwa capacity building menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perluasan jejaring kerja sama. Penelitian lainnya lebih banyak menyoroti penerapan konsep Community-Based Tourism (CBT) dalam pelestarian budaya (Puja & I, 2021); Zulhuda & Intan, 2025), sedangkan (Petrus & Promono, 2025) menekankan pentingnya pemanfaatan aset lokal melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pembangunan desa.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kapasitas pemerintah desa, pengembangan desa wisata, dan pelestarian budaya secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kapasitas kolaborasi pemerintah desa dalam pengembangan wisata budaya berbasis kampung adat masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora juga belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kapasitas pemerintah desa dalam mendukung pengembangan wisata budaya berbasis masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa yang mencakup aspek kelembagaan,

sumber daya manusia, dan kolaborasi dalam pengembangan wisata budaya Kampung Adat Waru Wora. Selain mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini juga menyusun rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola wisata budaya yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora melalui aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan kolaborasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengembangannya sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola wisata budaya berbasis masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji kapasitas Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata, proses, serta dinamika kapasitas pemerintah desa dalam mendukung pengembangan wisata budaya.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Waru Wora, Desa Patiala Bawa, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena kampung adat tersebut memiliki potensi wisata budaya yang masih terjaga, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan kolaborasi antaraktor.

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Informan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan wisata budaya Kampung Adat Waru Wora.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan wisata budaya. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa profil desa, dokumen perencanaan, foto kegiatan, dan arsip lain yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Profil Desa Patiala Bawa, RPJM Desa, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data mengacu pada model interaktif (Muhammad Zulfadhli, 2016), yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penerapan kedua teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas serta keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya Kampung Adat Waru Wora

a. Struktur dan Fungsi Pemerintah Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Patiala Bawa tercermin dari kemampuan struktur organisasi pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mendukung pengembangan Kampung Adat Waru Wora sebagai destinasi wisata budaya. Setiap unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kepala dusun hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi, pemerintah desa juga berfungsi sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan musyawarah desa, pelestarian budaya, kerja bakti masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga adat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Patiala Bawa yang menyampaikan: *Dalam setiap rencana pengembangan Kampung Adat Waru Wora kami tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kampung adat. Hal ini dilakukan agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan aturan adat yang sudah diwariskan oleh leluhur. Kami juga terus berupaya menjaga kerja sama agar pelestarian budaya dan pengembangan wisata dapat berjalan secara beriringan.*

Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *BPD selalu dilibatkan dalam pembahasan setiap program yang berkaitan dengan Kampung Adat Waru Wora. Kami bersama pemerintah desa memberikan masukan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga tetap menjaga kelestarian adat, rumah adat, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan selalu dibahas melalui musyawarah sehingga seluruh pihak dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pengembangan wisata budaya.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan Kampung Adat Waru Wora ditempuh melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menerapkan pola tata kelola yang partisipatif dalam proses pembangunan wisata budaya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa hingga saat penelitian berlangsung belum tersedia kelembagaan khusus yang menangani pengelolaan wisata, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) maupun unit pengelola di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi tersebut menyebabkan pembagian tugas dalam pengelolaan destinasi masih bersifat informal dan lebih mengandalkan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Patiala Bawa telah berkembang pada aspek koordinasi dan partisipasi masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan formal. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep capacity building yang dikemukakan (Damayanti & Ribawanto, 2011) yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi, tetapi juga oleh kejelasan fungsi, mekanisme kerja, dan sistem kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

(Setiawan et al., 2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi, kepemimpinan, serta kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat memiliki posisi yang sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan sehingga tata kelola wisata budaya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal.

b. Perencanaan Pengembangan Wisata Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Adat Waru Wora telah dimasukkan sebagai salah satu bagian dari agenda pembangunan Desa Patiala Bawa. Penyusunan program dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, serta masyarakat. Melalui forum tersebut, berbagai usulan pembangunan dihimpun dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Patiala Bawa sebagai berikut. *Program pengembangan wisata budaya selalu kami bahas bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pemerintah desa mengundang BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar semua pihak dapat menyampaikan usulan serta kebutuhan yang dianggap penting. Setelah itu, setiap usulan diprioritaskan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Dengan cara ini, kami berharap setiap program yang dilaksanakan benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat mendukung pelestarian Kampung Adat Waru Wora sebagai destinasi wisata budaya.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *Dalam setiap Musrenbang Desa, BPD ikut memberikan masukan mengenai program pengembangan Kampung Adat Waru Wora. Kami mendorong agar setiap rencana pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan wisata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan telah menerapkan pendekatan partisipatif. Pemerintah desa tidak menyusun program secara sepihak, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterlibatan BPD, tokoh adat, dan masyarakat mencerminkan adanya koordinasi serta komunikasi yang menjadi bagian penting dalam kapasitas kelembagaan pemerintah desa.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa hingga saat ini Desa Patiala Bawa belum memiliki dokumen perencanaan khusus yang mengatur arah pengembangan wisata budaya secara komprehensif. Program-program terkait pariwisata masih terintegrasi dalam RPJMDes sehingga belum dilengkapi dengan target, indikator keberhasilan, maupun strategi pengembangan yang lebih rinci.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan telah berjalan dengan baik, tetapi masih membutuhkan penguatan melalui penyusunan dokumen induk (master plan) pengembangan wisata budaya. Menurut (Damayanti & Ribawanto, 2011), kemampuan menyusun perencanaan yang sistematis dan adaptif merupakan salah satu indikator penting dalam penguatan kapasitas organisasi. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Setiawan et al., 2024) yang menjelaskan bahwa perencanaan yang jelas akan mempermudah implementasi program dan meningkatkan efektivitas pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, penyusunan master plan menjadi

langkah strategis agar pengembangan Kampung Adat Waru Wora memiliki arah yang lebih terukur, terencana, dan berkelanjutan.

c. Koordinasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora. Setiap kegiatan pembangunan maupun penerimaan wisatawan selalu diawali dengan komunikasi dan musyawarah bersama tokoh adat agar seluruh aktivitas tetap selaras dengan norma serta nilai budaya yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Adat Kampung Adat Waru Wora sebagai berikut. *Setiap ada program yang berkaitan dengan Kampung Adat Waru Wora selalu dibicarakan terlebih dahulu bersama tokoh adat. Pemerintah desa tidak pernah mengambil keputusan sendiri karena setiap kegiatan harus disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Melalui musyawarah, kami membahas tujuan kegiatan, manfaat bagi masyarakat, serta hal-hal yang harus dijaga agar tidak merusak nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Dengan adanya koordinasi yang baik, masyarakat dapat menerima setiap program dan ikut berpartisipasi dalam menjaga serta mengembangkan Kampung Adat Waru Wora sebagai destinasi wisata budaya.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *Kami sebagai masyarakat selalu dilibatkan apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan Kampung Adat Waru Wora. Pemerintah desa biasanya mengundang masyarakat untuk mengikuti musyawarah dan kerja bakti sebelum ada kegiatan atau kunjungan wisatawan. Kami bersama-sama membersihkan lingkungan kampung adat, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta membantu menyambut tamu yang datang. Keterlibatan masyarakat seperti ini membuat kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian budaya dan mendukung pengembangan wisata di desa.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dibangun pemerintah desa berlangsung secara partisipatif dan kolaboratif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam kegiatan gotong royong, pemeliharaan rumah adat, penyambutan wisatawan, serta pelaksanaan berbagai aktivitas budaya. Keterlibatan lembaga adat dalam setiap proses pengambilan keputusan juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata budaya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai adat yang berlaku di Kampung Adat Waru Wora.

Temuan penelitian ini selaras dengan konsep Community-Based Tourism yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata (Puja & I, 2021). Selain itu, hasil penelitian juga mendukung konsep Collaborative Governance yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lokal dalam mewujudkan tata kelola yang efektif. Meskipun demikian, koordinasi yang terjalin hingga saat ini masih lebih banyak bergantung pada komunikasi informal sehingga belum memiliki mekanisme kelembagaan yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, pembentukan forum koordinasi atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi langkah yang penting untuk memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian peran, dan menjamin keberlanjutan pengelolaan wisata budaya.

d. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Desa

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Patiala Bawa telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan Kampung Adat Waru Wora melalui berbagai program pembangunan desa serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Meskipun demikian, hingga penelitian ini dilakukan belum tersedia Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan wisata budaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Patiala Bawa sebagai berikut. *Pemerintah Desa Patiala Bawa berkomitmen untuk terus mengembangkan Kampung Adat Waru Wora sebagai salah satu potensi wisata budaya desa. Berbagai program telah kami masukkan ke dalam perencanaan pembangunan desa, namun pelaksanaannya masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Hingga saat ini kami memang belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengelolaan wisata budaya. Ke depan, kami berharap dapat menyusun regulasi tersebut agar pengelolaan wisata memiliki dasar hukum yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mampu mendukung pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *BPD mendukung upaya pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan Kampung Adat Waru Wora. Menurut kami, keberadaan Peraturan Desa sangat penting karena dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan wisata budaya, mengatur peran pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga adat, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan setiap program pembangunan. Dengan adanya regulasi yang jelas, koordinasi antar pihak juga akan menjadi lebih baik dan pengelolaan wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi wisata budaya melalui berbagai program pembangunan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan karena belum didukung oleh regulasi khusus yang mengatur pengelolaan wisata budaya. Akibatnya, pengelolaan destinasi belum memiliki ketentuan yang jelas mengenai kelembagaan pengelola, pembagian kewenangan, mekanisme pembiayaan, maupun upaya perlindungan terhadap kawasan budaya.

Temuan ini sesuai dengan pandangan (Damayanti & Ribawanto, 2011) yang menempatkan regulasi sebagai salah satu unsur penting dalam penguatan kapasitas organisasi. Regulasi berfungsi memberikan arah, kepastian hukum, serta pedoman pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Setiawan et al., 2024) yang menyatakan bahwa tata kelola desa wisata akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh regulasi yang adaptif dan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan wisata budaya menjadi kebutuhan yang strategis agar pengembangan Kampung Adat Waru Wora memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaannya.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam aspek regulasi telah tercermin melalui komitmen pemerintah desa dalam memasukkan pengembangan wisata budaya ke dalam agenda pembangunan desa. Namun demikian, kapasitas tersebut masih perlu diperkuat melalui penyusunan Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengelolaan Kampung Adat Waru Wora agar pelaksanaan program memiliki kepastian hukum, pembagian kewenangan yang jelas, serta mendukung pengelolaan wisata budaya yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Budaya

a. Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Pemerintah Desa Patiala Bawa telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta berkontribusi dalam mendukung pengembangan Kampung Adat Waru Wora sebagai destinasi wisata budaya. Meskipun demikian, kemampuan teknis aparatur yang berkaitan

dengan pengelolaan sektor pariwisata masih belum optimal. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek pelayanan kepada wisatawan, promosi digital, pengelolaan destinasi, serta pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi budaya lokal.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Patiala Bawa sebagai berikut. *Aparatur desa pada dasarnya telah menjalankan tugas pemerintahan dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing. Namun, jika berbicara mengenai pengelolaan wisata budaya, kami menyadari bahwa kemampuan aparatur masih perlu ditingkatkan. Kami masih membutuhkan pengetahuan mengenai pelayanan kepada wisatawan, promosi melalui media digital, pengelolaan destinasi wisata, serta cara mengembangkan potensi budaya agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap adanya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait agar aparatur desa mampu mengelola potensi wisata secara lebih profesional.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *Selama ini aparatur desa lebih banyak menjalankan tugas administrasi pemerintahan sehingga pengalaman dalam pengelolaan sektor pariwisata masih terbatas. Kami membutuhkan pelatihan mengenai pengelolaan desa wisata, penyusunan program, promosi digital, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mendukung pengembangan Kampung Adat Waru Wora secara lebih optimal. Dengan adanya peningkatan kompetensi, kami yakin aparatur desa akan lebih siap menghadapi tantangan dalam pengembangan wisata budaya.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa telah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan destinasi wisata budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi yang lebih spesifik agar aparatur desa mampu mengelola potensi wisata secara profesional.

Temuan tersebut selaras dengan pandangan (Damayanti & Ribawanto, 2011) yang menjelaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal, tetapi juga oleh kompetensi teknis, kemampuan manajerial, serta kapasitas aparatur dalam menciptakan inovasi. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Setiawan et al., 2024) yang menegaskan bahwa kualitas aparatur desa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan yang penting agar pengelolaan Kampung Adat Waru Wora dapat berlangsung secara lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Patiala Bawa pada aspek kompetensi aparatur telah terlihat melalui kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mendukung program pengembangan wisata budaya. Namun demikian, kompetensi teknis di bidang kepariwisataan masih perlu diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola Kampung Adat Waru Wora sebagai destinasi wisata budaya secara profesional dan berkelanjutan.

b. Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Wisata Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi aparatur desa maupun masyarakat masih relatif terbatas. Kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan lebih banyak berorientasi pada administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan pelatihan yang secara khusus membahas pengelolaan wisata budaya belum dilakukan secara intensif.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Patiala Bawa sebagai berikut. *Sampai sekarang masyarakat memang belum banyak memperoleh pelatihan yang secara khusus membahas pengelolaan wisata budaya. Kami masih membutuhkan pelatihan mengenai pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan homestay, pemanduan wisata, pemasaran digital, serta cara mengembangkan kerajinan dan produk budaya agar memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya pelatihan tersebut, masyarakat akan lebih siap menerima wisatawan, memberikan pelayanan yang baik, dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan Kampung Adat Waru Wora.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *Pemerintah desa menyadari bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora. Selama ini pelatihan yang tersedia masih lebih banyak berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan pelatihan mengenai pengelolaan wisata budaya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk menyelenggarakan pelatihan yang lebih terarah agar masyarakat dan aparatur desa memiliki kemampuan dalam mengelola destinasi wisata budaya secara profesional.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi aparatur desa maupun masyarakat, belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya pada aspek teknis yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata budaya. Padahal, kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, mengelola fasilitas wisata, melakukan promosi digital, serta mengembangkan produk budaya merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi wisata.

Temuan ini sejalan dengan konsep capacity building yang dikemukakan (Damayanti & Ribawanto, 2011), yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas perlu dilakukan melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Penelitian (Setiawan et al., 2024) juga menunjukkan bahwa program pelatihan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing desa wisata melalui peningkatan kompetensi masyarakat dan aparatur desa. Dengan demikian, pelatihan yang berfokus pada pelayanan wisatawan, pemanduan wisata, pemasaran digital, serta pengembangan produk budaya perlu menjadi agenda prioritas dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora.

c. Kemampuan Menyusun Program Pengembangan Wisata Budaya

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Patiala Bawa telah menyusun berbagai program pengembangan wisata budaya melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Program yang diusulkan mencakup pembangunan akses menuju kawasan wisata, penataan lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelestarian rumah adat dan berbagai aktivitas budaya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Patiala Bawa: *Setiap usulan pengembangan Kampung Adat Waru Wora selalu kami bahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Dalam forum tersebut pemerintah desa mengundang BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar semua pihak dapat menyampaikan usulan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Program yang disepakati kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kami berharap setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung*

pelestarian budaya di Kampung Adat Waru Wora.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *Penyusunan program pengembangan wisata budaya selalu dilakukan melalui proses musyawarah dan mempertimbangkan hasil usulan dari masyarakat. Pemerintah desa berupaya menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan desa, seperti pembangunan akses jalan, penataan lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelestarian rumah adat. Namun, tidak semua program dapat langsung dilaksanakan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa dan dukungan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan program telah menerapkan prinsip partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Pemerintah desa tidak menyusun program secara sepihak, tetapi mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah. Meskipun demikian, pelaksanaan beberapa program masih menghadapi kendala akibat keterbatasan anggaran sehingga realisasinya masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan telah berkembang dengan baik, meskipun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Kondisi ini sesuai dengan pendapat (Damayanti & Ribawanto, 2011) yang menyatakan bahwa salah satu indikator kapasitas organisasi adalah kemampuan menyusun program yang realistis, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Setiawan et al., 2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata.

d. Kemampuan Membangun Kemitraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Patiala Bawa telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga adat, masyarakat, serta beberapa komunitas yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata budaya. Bentuk kemitraan tersebut diwujudkan melalui koordinasi pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, dan pelestarian budaya lokal.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Patiala Bawa sebagai berikut. *Pemerintah Desa Patiala Bawa selalu terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan Kampung Adat Waru Wora. Kami menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, lembaga adat, masyarakat, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata budaya. Ke depan kami juga berharap dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas agar memperoleh pendampingan, promosi, serta berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wisata budaya di desa.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut. *Menurut kami, pengembangan Kampung Adat Waru Wora tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah desa. Diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga adat, masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya agar pengembangan wisata budaya berjalan lebih baik. Melalui kemitraan tersebut diharapkan desa memperoleh dukungan berupa pelatihan, promosi, bantuan sarana dan prasarana, serta pendampingan dalam pengelolaan wisata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki komitmen untuk membangun jejaring kerja sama dalam mendukung pengembangan wisata budaya. Kemitraan yang telah terjalin memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk memperoleh dukungan dalam bentuk pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi destinasi, maupun pengembangan infrastruktur. Namun demikian, kemitraan yang ada masih bersifat insidental dan belum berkembang menjadi kerja sama jangka panjang yang memiliki program, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori capacity building yang dikemukakan (Damayanti & Ribawanto, 2011), yang menempatkan kemampuan membangun jejaring sebagai salah satu unsur penting dalam memperkuat kapasitas organisasi. Melalui kemitraan, pemerintah desa dapat memperoleh dukungan berupa sumber daya, pengetahuan, serta inovasi yang dibutuhkan dalam pembangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung konsep Community-Based Tourism (CBT) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata (Puja & I, 2021). Oleh karena itu, perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata, media, dan sektor swasta menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengembangan Kampung Adat Waru Wora.

Kapasitas Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Patiala Bawa telah menerapkan pola kolaborasi dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga adat, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora. Berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan kawasan umumnya dibahas melalui Musyawarah Desa sehingga keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Patiala Bawa sebagai berikut. *Setiap program pengembangan Kampung Adat Waru Wora selalu kami konsultasikan dengan lembaga adat, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Kami tidak ingin ada kebijakan yang bertentangan dengan aturan adat karena keberadaan Kampung Adat Waru Wora merupakan warisan budaya yang harus dijaga bersama. Melalui musyawarah, setiap pihak dapat memberikan masukan sehingga program yang dilaksanakan tidak hanya mendukung pengembangan wisata, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kepentingan masyarakat.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Adat Kampung Adat Waru Wora yang menyatakan sebagai berikut. *Hubungan antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat selama ini berjalan dengan baik. Setiap rencana kegiatan selalu dibicarakan bersama agar tidak bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku. Kami mendukung pengembangan wisata budaya selama pelaksanaannya tetap menghormati rumah adat, ritual adat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Dengan adanya kerja sama yang baik, masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga Kampung Adat Waru Wora.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang membangun koordinasi dan kolaborasi antarberbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan pemerintah desa, lembaga adat, BPD, dan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pengembangan wisata budaya dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan bersama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak berperan sebagai pelaksana tunggal dalam proses pembangunan, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Pola tersebut mencerminkan praktik Collaborative Governance, yaitu pendekatan pembangunan yang mengedepankan dialog, partisipasi, dan pembagian tanggung jawab antaraktor sebagaimana dijelaskan oleh (Setiawan et al., 2024). Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga rumah adat, melaksanakan ritual budaya, serta menerima kunjungan wisatawan juga memperlihatkan penerapan konsep Community-Based Tourism (CBT), yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata (Puja & I, 2021).

Selain membangun kolaborasi antaraktor, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Adat Waru Wora telah memanfaatkan berbagai aset lokal yang dimiliki masyarakat, seperti rumah adat, tradisi, ritual budaya, dan modal sosial yang masih kuat. Kondisi tersebut sesuai dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang menekankan bahwa pembangunan sebaiknya bertumpu pada potensi dan kekuatan lokal, bukan semata-mata bergantung pada bantuan dari luar.

Walaupun demikian, kapasitas kolaborasi masih memerlukan penguatan, terutama melalui pembentukan kemitraan yang lebih formal dan berkelanjutan dengan perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata, media, maupun sektor swasta. Kehadiran berbagai mitra tersebut diharapkan tidak hanya mendukung promosi destinasi, tetapi juga memperkuat peningkatan kapasitas masyarakat, mendorong inovasi, serta mengembangkan ekonomi lokal sehingga pengelolaan wisata budaya Kampung Adat Waru Wora dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa salah satu kekuatan utama dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora adalah tingginya dukungan masyarakat adat. Masyarakat masih mempertahankan rumah adat, menjalankan berbagai ritual budaya, serta aktif terlibat dalam kegiatan gotong royong dan penyambutan wisatawan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap warisan budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Ketua Adat sebagai berikut: *Masyarakat sampai sekarang tetap menjaga rumah adat, melaksanakan berbagai ritual adat, dan mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Kami menganggap rumah adat dan seluruh nilai budaya yang ada bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai identitas masyarakat yang harus terus dilestarikan. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wisata selalu dilakukan dengan tetap menghormati aturan adat agar budaya yang kami miliki tidak hilang meskipun jumlah wisatawan terus bertambah.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Patiala Bawa yang menyatakan sebagai berikut.

"Masyarakat selalu berusaha mendukung pengembangan Kampung Adat Waru Wora karena kami menyadari bahwa wisata budaya dapat memberikan manfaat bagi desa. Kami ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki rumah adat, menyambut

wisatawan yang datang, serta menjaga keamanan dan kebersihan kawasan kampung adat. Kami berharap budaya yang diwariskan oleh leluhur tetap lestari sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Kampung Adat Waru Wora tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah desa, tetapi juga didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Selain keterlibatan masyarakat, daya tarik Kampung Adat Waru Wora juga diperkuat oleh keberadaan 36 rumah adat, berbagai tradisi dan ritual budaya yang masih dilaksanakan, serta kondisi lingkungan yang masih alami. Potensi tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan wisata budaya yang berbasis pada kekuatan lokal.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui berbagai bentuk pembinaan, promosi, serta pembangunan infrastruktur. Meskipun dukungan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan wisata, keberadaannya telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemerintah desa dalam mengembangkan Kampung Adat Waru Wora sebagai destinasi wisata budaya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Adat Waru Wora lebih banyak bertumpu pada pemanfaatan aset lokal, baik berupa budaya, modal sosial, maupun potensi lingkungan yang dimiliki masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), yang menempatkan aset lokal sebagai fondasi utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga mendukung konsep Community-Based Tourism (CBT) yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan destinasi wisata (Puja & I, 2021).

Di balik berbagai potensi yang dimiliki, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang masih membatasi kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan wisata budaya. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran desa. Alokasi Dana Desa yang harus dibagi untuk berbagai program pembangunan menyebabkan pendanaan khusus bagi pengembangan wisata budaya masih relatif terbatas. Dampaknya, pembangunan fasilitas pendukung maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kondisi tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Patiala Bawa sebagai berikut: Program pengembangan wisata masih menyesuaikan kemampuan anggaran desa sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selain persoalan anggaran, penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia masih memerlukan penguatan. Kompetensi aparatur desa dan masyarakat dalam bidang pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan, pemasaran digital, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya masih belum memadai. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan potensi wisata yang dimiliki Kampung Adat Waru Wora.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata. Beberapa fasilitas seperti akses jalan, area parkir, papan informasi, toilet umum, dan pusat informasi wisata masih memerlukan peningkatan agar mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Di samping itu, kegiatan promosi masih dilakukan secara sederhana melalui media sosial maupun informasi dari mulut ke mulut sehingga jangkauan pemasaran destinasi belum berkembang secara optimal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun sektor swasta masih bersifat sementara dan belum diarahkan pada program pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat maupun pengembangan destinasi belum berlangsung secara konsisten.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan Kampung Adat Waru Wora bukan terletak pada keterbatasan potensi wisata, melainkan pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan jejaring kemitraan. Hasil penelitian ini selaras dengan teori *capacity building* yang dikemukakan (Damayanti & Ribawanto, 2011), yang menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kompetensi individu, serta membangun kolaborasi yang efektif. Temuan ini juga mendukung penelitian (Setiawan et al., 2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan desa wisata di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora dapat dikategorikan cukup baik. Hal tersebut tercermin dari kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi kelembagaan, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, serta membangun koordinasi dengan lembaga adat sebagai mitra utama dalam pengelolaan kawasan budaya. Keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan wisata budaya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan wisata masih menghadapi beberapa keterbatasan. Belum tersedianya regulasi khusus mengenai pengelolaan wisata budaya, belum terbentuknya kelembagaan pengelola destinasi, keterbatasan kompetensi aparatur, minimnya pelatihan yang berorientasi pada sektor pariwisata, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan sejumlah aspek yang masih memerlukan perhatian.

Temuan penelitian ini memperkuat teori *capacity building* yang dikemukakan oleh (Damayanti & Ribawanto, 2011), yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, efektivitas sistem kelembagaan, serta kemampuan organisasi dalam membangun jejaring kerja yang produktif. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung konsep *Community-Based Tourism (CBT)*, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata, serta pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* yang menekankan pentingnya pemanfaatan aset budaya, modal sosial, dan potensi lokal sebagai dasar pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pengembangan Kampung Adat Waru Wora memerlukan strategi penguatan kapasitas yang lebih komprehensif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyusun Peraturan Desa mengenai pengelolaan wisata budaya, membentuk kelembagaan khusus seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau unit pengelola di bawah BUMDes, meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata, media, dan sektor swasta. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola wisata budaya yang lebih profesional, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Kampung Adat Waru Wora.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Patiala Bawa dalam mengembangkan potensi wisata budaya Kampung Adat Waru Wora tergolong cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek. Dari sisi kelembagaan, pemerintah desa telah menerapkan tata kelola yang partisipatif dengan melibatkan

masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga adat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program. Namun, belum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan wisata budaya dan belum terbentuknya kelembagaan pengelola, seperti Pokdarwis atau unit wisata di bawah BUMDes, menyebabkan pengelolaan destinasi belum berjalan secara optimal.

Pada aspek sumber daya manusia, aparatur desa telah mampu menjalankan tugas pemerintahan dan menyusun program pembangunan, tetapi kompetensi teknis dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, promosi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Sementara itu, kapasitas kolaborasi telah terbangun melalui kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah daerah, meskipun kemitraan dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan pelaku industri pariwisata masih perlu diperluas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan masyarakat adat, keaslian budaya, potensi lingkungan, dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendukung pengembangan wisata budaya. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, promosi, serta kemitraan yang belum optimal masih menjadi kendala dalam pengembangan Kampung Adat Waru Wora.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, penyusunan regulasi khusus, pembentukan organisasi pengelola wisata, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan perlu menjadi prioritas agar pengelolaan wisata budaya Kampung Adat Waru Wora dapat berlangsung secara lebih profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asruni Azis. (2025). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Daerah Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa. 477–497.
- Damayanti & Ribawanto. (2011). STRATEGI CAPACITY BUILDING PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KAMPOENG EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). 2(3), 464–470.
- Febriyanti, N. S. (2026). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa. 3(2), 30–45.
- H.J. Pramaswari¹, I Made Sendra², I. G. P. B. S. M. (2025). MODEL KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SUKA BARU, KECAMATAN MARGA SAKTI SEBLAT, KABUPATEN BENGKULU UTARA. 13(2), 270–276.
- Handini & Darwina. (2025). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI LOKAL MELALUI INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. 2(5), 964–986.
- Muhammad Zulfadhli. (2016). PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KOTA SAMARINDA. 4(1), 2392–2404.
- Petrus & Promono. (2025). Pendampingan Pemberdayaan Desa Biting Melalui Prinsip Asset-Based Community Development (ABCD) dalam Program “Nusa Loe” Menuju Desa Mandiri Manggarai Timur. September.
- Puja, I. B. P., & I. (2021). Kepariwisata Berbasis Masyarakat, Budaya, dan Berkelanjutan.
- Setiawan, A., Wulandari, W., Munawaroh, S., Jenderal, U., Yani, A., Terusan, J., Sudirman, J., Barat, J., & Cimahi, K. (2024). KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN

NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. 7(1), 15–27.

Susana Santy & Rusnisti. (2026). Peran Pemerintah Kampung dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. 01, 1–9.

Umbu T.W. Pariangu2. (2026). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Objek Wisata Bukit Bikium, Desa Tunua).

Zulhuda & Intan. (2025). Kearifan Lokal sebagai Sumber Inspirasi dalam Pengembangan Produk Wisata Budaya Kreatif. 5, 2089–2100.